



Judul : Rekrutmen Sentralistik
Tanggal : Jumat, 21 Juni 2013
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Rekrutmen Sentralistik

Intensitas Hubungan Caleg dengan Konstituen Relatif Kecil

JAKARTA, KOMPAS — Setidaknya sepertiga caleg yang mencoba bertarung menjadi wakil rakyat dari sejumlah wilayah di Indonesia tinggal di DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan rekrutmen caleg yang sentralistik dan elitis. Kemungkinan caleg tak mampu menyerap aspirasi pun membesar.

Dalam pantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), calon anggota legislatif (caleg) yang beralamat DKI Jakarta tetapi mencalonkan diri dari wilayah di luar Ibu Kota mencapai 2.100 orang atau 32 persen dari 6.550 caleg dalam daftar calon sementara (DCS) anggota DPR. Partai Demokrat menempatkan warga Jakarta di daerah sebanyak 248 orang atau 44 persen dari 560 caleg yang diajukan, diikuti Partai Golkar dengan 234 calon dan Partai Hanura 230 calon. Hal ini merata dialami semua partai politik peserta Pemilu 2014.

Manajer Pemantauan JPPR Masykurudin Hafidz, Kamis (20/6), di Jakarta, mengatakan, selain sentralistik dan elitis, parpol terkesan kurang mempertimbangkan aspek kondisi sosial daerah pemilihan (dapil) dan kedekatan caleg dengan konstituen. Akibatnya, biaya kampanye menjadi besar. Sebab, parpol dan caleg akan mengambil jalan pintas dengan banyak alat peraga dan iklan. Para calon hanya turun ke dapil ketika kampanye terbuka. Sebaliknya, kedekatan dengan konstituen tak terwujud. Aspirasi masyarakat pun tak sampai.

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Imam Nahravi membantah adanya aspirasi yang mandek ketika caleg berasal dari Jakarta. Menurut dia, sepanjang caleg berniat untuk menjadi bagian masyarakat, tidak ada bedanya caleg yang berasal dari Ibu Kota dengan kader daerah. Caleg yang sudah malang melintang di Jakarta memiliki kelebihan karena memiliki akses informasi yang dianggap akurat.

Secara terpisah, fungsionaris DPP PDI-P, Arif Wibowo, menga-

takan, semua caleg PDI-P wajib turun ke dapil dan melebur dengan masyarakat. Tak ada alasan untuk tidak dekat dengan masyarakat. Justru komunikasi dan relasi harus terbangun kuat dan baik jika caleg berharap menjadi wakil rakyat.

Sebagai caleg petahana, kata Arif, komunikasi bisa dijalin dengan memanfaatkan teknologi. Hal serupa disampaikan Imam Nahravi yang juga menempatkan aspirasi konstituennya di Sidoarjo dan Surabaya.

"Seharusnya, DPR juga memiliki rumah aspirasi di setiap dapil yang difasilitasi negara. Anggarannya bisa saja diambil dari alokasi dana anggota. DPD saja memiliki gedung perwakilan di setiap provinsi," ucap Imam.

Terkait keteguhan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, Arif menambahkan, hal itu semestinya dilihat dari rekam jejak (*track record*) caleg, bukan dari tempat tinggalnya. "Seseorang tidak bisa tiba-tiba memperjuangkan kepentingan rakyat jika tidak pernah terlibat dengan urusan-urusan seperti ini, apalagi jika tanpa kapasitas dan integritas. Jadi, seharusnya warga memilih dengan memperhatikan *track record* caleg juga," tutur Arif.

Masykurudin menambahkan, para caleg tidak bisa tidak se-

mestinya mengurangi penggunaan iklan dan alat peraga, tetapi turun ke masyarakat dan banyak mendengar. Parpol juga perlu mengaktifkan kantor-kantornya untuk mendidik pemilih, mengajak komunikasi, dan menyerap aspirasi.

Aspirasi tak terjamin

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menjelaskan, proses rekrutmen parpol yang semula terkesan terbuka dengan putra daerah ternyata masih sentralistik. Tokoh-tokoh lokal tidak banyak diakomodasi parpol.

"Intensitas hubungan caleg dengan konstituen relatif kecil. Seandainya para petahana yang diajukan parpol terpilih kembali, mubazirlah proses demokrasi ini. Aspirasi rakyat di setiap dapil tak akan efektif diperjuangkan para caleg," ujar Sebastian.

Menurut dia, banyaknya caleg yang berdomisili di Jabodetabek untuk dapil di luar wilayah itu memperlihatkan parpol kurang mempromosikan kader daerah. Selain itu, fakta ini menunjukkan, kaderisasi parpol di daerah tidak berjalan baik dan orientasi parpol masih sangat sentralistik.

Selain soal domisili, Formappi juga mencatat, total nama caleg yang diajukan 12 parpol untuk DPR di 77 dapil sebanyak 6.544 orang. Jumlah ini sudah berkurang dari jumlah sebelumnya (22 April 2013) sebanyak 6.577 bakal caleg. Jumlah itu terdiri dari 2.445 caleg perempuan dan 4.099 caleg laki-laki.

Dalam beberapa hari ini, masyarakat diberi ruang untuk memberi masukan terkait para caleg dalam DCS. Namun, sosialisasi yang sangat minim diperkirakan tidak akan efektif menyangkal kembali caleg-caleg yang bermasalah. (INA/OSA)